BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA KINERJA TAHUNAN

DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT

DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT
DEPUTI BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
BADAN NARKOTIKA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
T.A 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya kami dapat menerbitkan Rencana Kinerja Tahunan tahun 20243 ini, yang capaiannya diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat dan kita semua, sehingga dari tahun ke tahun menumbuhkembangkan hasil nyata bagi masyarakat dalam menciptakan lingkungan bersih Narkoba. Rencana Kinerja Tahunan ini disusun berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Adapun hal-hal yang tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan ini berasal dari Perjanjian Kinerja yang mencangkup target-target kinerja yang harus dicapai Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN pada Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahunan 2024 ini merupakan langkah awal dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/ Lembaga (RKAKL)

Akhirnya, kami berharap agar Rencana Kinerja Tahunan Direktorat Peran Serta Masyarakat tahun 2024 ini dapat menjadi acuan kinerja menuju terciptanya lembaga dan lingkungan Kabupaten/ Kota yg tanggap ancaman bahaya penyalahgunaan Narkoba.

Direktur Peran Serta Masyarakat

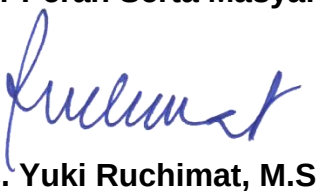

Drs. Yuki Ruchimat, M.Si

BAB I
PENDAHULUAN

A. KONDISI UMUM

1. Permasalahan

lndonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang (narkoba) yang tinggi. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional Republik lndonesia (BNN RI) bekerjasama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, angka prevalensi penyalahgunaan narkoba mengalami penurunan dari 1,95% menjadi 1,73% untuk setahun terakhir pakai dan pada kategori pernah pakai menurun dari 2,47% menjadi 2,20%. Jumlah ini bisa saja mengalami peningkatan yang signifikan apabila kita tidak memiliki kepedulian untuk mengatasi permasalahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terjadi di lingkungan sekitar kita.

Dalam menangani permasalahan narkotika di seluruh wilayah Indonesia, BNN RI melakukan strategi *Soft Power Approach* melalui upaya Pencegahan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Rehabilitasi. Salah satu upaya yang dilakukan BNN melalui Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat adalah dengan meningkatkan ketanggasiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan peranan dan kontribusi pemerintah daerah maupun di setiap kabupaten/kota. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kompleksitas permasalahan narkoba yang meliputi antara lain: (i) peredaran gelap narkoba yang terus berkembang dan mengancam masyarakat di seluruh penjuru pelosok negara; (ii) penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada jenis narkotika golongan I, II, dan III, tetapi juga psikotropika, obat-obatan dan bahan-bahan lain yang mengandung zat psikoatif - termasuk minuman keras atau minuman oplosan; (iii) tidak hanya menimpa kalangan orang dewasa, tetapi telah merambah ke berbagai kalangan, termasuk remaja dan anak-anak.

Peran Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengolaborasi dan memobilisasi sumber daya yang dimiliki seluruh komponen di daerah, baik kalangan pemerintah, dunia usaha, maupun masyarakat. Hal itu diharapkan dapat memperkuat kemampuan daerah dalam mengantisipasi, mengadaptasi, dan memitigasi ancaman dan gangguan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Upaya-upaya pemerintah daerah tersebut dapat diintegrasikan dengan program-program pembangunan daerah yang telah dan akan dilaksanakan oleh berbagai sektor sehingga dampak keberhasilannya berantai. lntegrasi program tersebut dapat sejalan dengan agenda perwujudan kota berkelanjutan sebagaimana visi nasional pembangunan kota, yaitu: "Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045".

Sedangkan upaya pengayaan orientasi visi Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045 untuk mewujudkan kondisi atau status kota yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman penyalahgunaan narkoba dapat menjadi salah satu dimensi yang relevan dalam pembangunan daerah. Ruang lingkup Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba mencakup aspek manusia, infrastruktur, manajemen, kelembagaan, dan kebijakan daerah yang secara keseluruhan merupakan bagian inti atau substansi dari arah pembangunan kota.

Ketanggapan pemerintah daerah terhadap ancaman narkoba menjadi salah satu poin penting melaksanakan Rencana aksi nasional P4GN. Pelaksanaannya tidak hanya tertuju pada melaksanakan pemberantasan narkoba, tetapi yang tak kalah penting adalah melaksanakan strategi mencegah penyalahgunaan narkoba yang berlangsung masif dan sistematis.

Kebijakan dan strategi dalam mewujudkan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba atau yang disingkat KOTAN ini merupakan upaya pengayaan orientasi visi Pembangunan Kota Berkelanjutan dan Berdaya Saing pada Tahun 2045. Kondisi atau status Kabupaten /Kota yang tanggap terhadap berbagai potensi ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dapat menjadi salah satu dimensi yang relevan.

Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai inisiator dan regulator bertugas menyiapkan regulasi, panduan, dan instrumen yang berfungsi sebagai

acuan dalam implementasi kebijakan. Pada akhirnya, kebijakan Kota Tanggap Ancaman Narkoba ini diharapkan sudah terbentuk suatu sistem ketanggapan yang berkelanjutan pada Kabupaten/Kota. Sistem tersebut mencakup aspek sosial dan budaya, ekonomi, kesehatan, dan pertahanan keamanan, baik dari segi dukungan regulasi dan fasilitasi yang memadai, serta pendanaan yang secara konsisten dianggarkan.

2. Hasil Evaluasi

Pada tahun 2023 ini merupakan tahun keempat periode pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024 yang telah ditetapkan dan sebagai wujud pelaksanaan amanat yang dikandung pada visi dan misi Badan Narkotika Nasional. Sasaran strategis yang tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat tahun 2020-2024 melalui Penyelenggaraan Peran Serta Masyarakat yaitu Meningkatnya Kesadaran dan Kepedulian Masyarakat dalam Penanganan P4GN.

Pencapaian Direktorat Peran Serta Masyarakat pada tahun 2023 merupakan hasil peningkatan kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN yang didasarkan pada Indikator Kinerja Program yaitu Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP) di tahun 2023 dicapai dengan angka indeks 3,5 dengan kategori Sangat Mandiri dari yang ditargetkan 3,25 angka indeks dengan kategori Mandiri.

Dari capaian program yang menyasar lingkungan kerja yang meliputi lingkungan kerja pemerintah dan lingkungan kerja swasta, lingkungan pendidikan dan lingkungan masyarakat, capaian terbesar IKP berhasil diwujudkan oleh lingkungan pendidikan mencapai skala 3,51 (Sangat Mandiri) dengan persentase kinerja sebesar 108 %. Hal itu tampak dari terlaksananya lnpres nomor 2/2020 dalam rencana Aksi P4GN TA 2020 ini, seperti: sosialisasi, tes urin, regulasi dan pembentukan satgas P4GN di lingkungannya masing-masing.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana kerja dan Anggaran Kementerian Lembaga;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
7. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 05 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional;
8. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 06 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 08 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sitem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Badan Narkotika Nasional.

BAB II
RENCANA KINERJA DAN KEBUTUHAN PENDANAAN
DIREKTORAT PERAN SERTA MASYARAKAT
TAHUN 2024

Direktorat Peran Serta Masyarakat menetapkan rencana kinerja Tahun 2024 sesuai dengan arah kebijakan dan rencana kinerja BNN Tahun 2024. Rencana Kinerja Tahun 2024 sebagai gambaran rencana program kerja Direktorat Peran Serta Masyarakat dalam satu tahun mendatang bersama seluruh unit kerja vertikal. Adapun rencana target kinerja dan kebutuhan pendanaan Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2024 sebagai berikut :

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/ KEGIATAN	TARGET KINERJA	KEBUTUHAN PENDANAAN
1	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat	Meningkatnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam penanganan P4GN	Indeks Kemandirian Partisipasi (IKP)	3,30	47.692.932.000

Pada tahun 2024 Direktorat Peran Serta Masyarakat mengalokasikan anggaran bagi instansi vertikal sebesar Rp. 43.541.500.000,- bagi 34 BNNP dan 173 BNN Kabupaten/Kota seluruh lndonesia dengan lndikator Kinerja Kegiatan dalam bentuk lndeks Kemandirian partisipasi (lKP). Target capaian IKP masing-masing BNNP dan BNNK besarannya berbeda- beda. Hal ini ditentukan berdasarkan dialog kinerja yang telah dilaksanakan beberapa waktu sebelumnya bahwa data awal target capaian (baseline) adalah data realisasi capaian tahun sebelumnya yaitu tahun 2023. Selanjutnya kesepakatan ini dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Satker Vertikal.

Untuk Satker Direktorat Peran Serta Masyarakat sendiri yang berkedudukan di BNN pusat pada tahun 2024 mendapatkan anggaran sebesar Rp.4.151.432.000,-

dengan target kinerja berupa lndeks Kemandirian Partisipatif (lKP) sebesar 3,30 yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Unit Eselon ll.

BAB III
PENUTUP

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) merupakan pedoman untuk melaksanakan pengukuran kinerja dalam rangka pencapaian visi dan misi Direktorat Peran serta Masyarakat selama periode satu tahun. Pengukuran atas kinerja Direktorat Peran Serta Masyarakat yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan merujuk kepada RKT Direktorat Peran Serta Masyarakat Tahun 2023.

Dokumen RKT Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Tahun 2024 menggambarkan target kinerja dan anggaran kumulatif Direktorat Peran Serta Masyarakat dari seluruh unit organisasi pusat dan vertikal di lingkungan BNN. RKT Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Tahun 2024 ini akan menjadi dokumen sumber bagi penetapan perjanjian kinerja unit organisasi di lingkungan Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN untuk tahun 2024. Dengan demikian, dokumen RKT Dayamas BNN Tahun 2024 juga menjadi acuan bagi pelaksanaan program dan kegiatan peran serta masyarakat di tahun anggaran 2024.

Demikian RKT Direktorat Peran Serta Masyarakat BNN Tahun 2024 ini disusun sebagai bagian dari kesinambungan proses mewujudkan ketanggapsiagaan masyarakat terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika.

Penanggung Jawab Kegiatan,

Nama : Yuki Ruchimat, M.Si
NIP : 196709021994031007

Lampiran

Sebaran Anggaran dan Volume
Rincian Output 3257.QDB.001
Kegiatan Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat
Tahun 2024

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOL RO	SATUAN
	Direktorat Peran Serta Masyarakat	4.151.432.000	1	NSPK
1	BNNP NANGGROE ACEH DARUSSALAM	259.002.000	2	Lembaga
2	BNN KABUPATEN ACEH SELATAN	201.670.000	2	Lembaga
3	BNN KABUPATEN GAYO LUES	201.670.000	2	Lembaga
4	BNN KABUPATEN PIDIE JAYA	201.670.000	2	Lembaga
5	BNN KOTA Sabang	201.670.000	2	Lembaga
6	BNN KOTA LHOKSEUMAWE	201.670.000	2	Lembaga
7	BNN KOTA LANGSA	201.670.000	2	Lembaga
8	BNN KABUPATEN BIREUEN	201.670.000	2	Lembaga
9	BNN KABUPATEN ACEH TAMIANG	201.670.000	2	Lembaga
10	BNN KABUPATEN PIDIE	201.670.000	2	Lembaga
11	BNN KOTA BANDA ACEH	201.670.000	2	Lembaga
12	BNNP SUMATERA UTARA	259.002.000	2	Lembaga
13	BNN KABUPATEN KARO	207.095.000	2	Lembaga
14	BNN KOTA BINJAI	207.095.000	2	Lembaga
15	BNN KOTA TANJUNG BALAI	207.095.000	2	Lembaga
16	BNN KOTA Gunungsitoli	207.095.000	2	Lembaga
17	BNN KABUPATEN DELI SERDANG	207.095.000	2	Lembaga
18	BNN KOTA PEMATANG SIANTAR	207.095.000	2	Lembaga
19	BNN KABUPATEN LANGKAT	207.095.000	2	Lembaga
20	BNN KABUPATEN ASAHAN	207.095.000	2	Lembaga
21	BNN KABUPATEN MANDAILING NATAL	207.095.000	2	Lembaga
22	BNN KABUPATEN TAPANULI SELATAN	207.095.000	2	Lembaga
23	BNN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI	207.095.000	2	Lembaga
24	BNN KOTA TEBING TINGGI	207.095.000	2	Lembaga
25	BNN KABUPATEN SIMALUNGUN	207.095.000	2	Lembaga
26	BNN KABUPATEN LABUHANBATU UTARA	207.095.000	2	Lembaga
27	BNN KABUPATEN BATU BARA	207.095.000	2	Lembaga
28	BNNP SUMATERA BARAT	259.002.000	2	Lembaga
29	BNN KOTA Sawahlunto	189.470.000	2	Lembaga
30	BNN KOTA PAYAKUMBUH	189.470.000	2	Lembaga
31	BNN KABUPATEN SOLOK	189.470.000	2	Lembaga
32	BNN KABUPATEN PASAMAN BARAT	189.470.000	2	Lembaga

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOL RO	SATUAN
33	BNNP RIAU	249.002.000	2	Lembaga
34	BNN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI	189.470.000	2	Lembaga
35	BNN KABUPATEN Pelalawan	189.470.000	2	Lembaga
36	BNN KOTA PEKANBARU	189.470.000	2	Lembaga
37	BNN KOTA DUMAI	189.470.000	2	Lembaga
38	BNNP JAMBI	251.002.000	2	Lembaga
39	BNN KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR	184.065.000	2	Lembaga
40	BNN KOTA JAMBI	184.065.000	2	Lembaga
41	BNN KABUPATEN BATANGHARI	184.065.000	2	Lembaga
42	BNNP SUMATERA SELATAN	249.002.000	2	Lembaga
43	BNN KABUPATEN Ogan Ilir	189.405.000	2	Lembaga
44	BNN KOTA PAGARALAM	189.405.000	2	Lembaga
45	BNN KOTA LUBUKLINGGAU	189.405.000	2	Lembaga
46	BNN KABUPATEN EMPAT LAWANG	189.405.000	2	Lembaga
47	BNN KOTA PRABUMULIH	189.405.000	2	Lembaga
48	BNN KABUPATEN MUARA ENIM	189.405.000	2	Lembaga
49	BNN KABUPATEN MUSI RAWAS	189.405.000	2	Lembaga
50	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR	189.405.000	2	Lembaga
51	BNN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR	189.405.000	2	Lembaga
52	BNNP LAMPUNG	246.002.000	2	Lembaga
53	BNN KABUPATEN Tanggamus	187.320.000	2	Lembaga
54	BNN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN	187.320.000	2	Lembaga
55	BNN KOTA METRO	187.320.000	2	Lembaga
56	BNN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR	187.320.000	2	Lembaga
57	BNN KABUPATEN WAY KANAN	187.320.000	2	Lembaga
58	BNNP KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	249.002.000	2	Lembaga
59	BNN KABUPATEN Bangka	206.145.000	2	Lembaga
60	BNN KOTA PANGKAL PINANG	206.145.000	2	Lembaga
61	BNN KABUPATEN BELITUNG	206.145.000	2	Lembaga
62	BADAN NARKOTIKA NASIONAL BANGKA SELATAN	206.145.000	2	Lembaga
63	BNNP KEPULAUAN RIAU	252.002.000	2	Lembaga
64	BNN KABUPATEN KARIMUN	201.905.000	2	Lembaga
65	BNN KOTA BATAM	201.905.000	2	Lembaga
66	BNN KOTA TANJUNG PINANG	201.905.000	2	Lembaga
67	BNNP BENGKULU	247.002.000	2	Lembaga
68	BNN KOTA BENGKULU	191.850.000	2	Lembaga
69	BNN KABUPATEN Bengkulu Selatan	191.850.000	2	Lembaga
70	BNNP DKI JAKARTA	236.602.000	2	Lembaga

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOL RO	SATUAN
71	BNN KOTA JAKARTA SELATAN	217.645.000	2	Lembaga
72	BNN KOTA JAKARTA TIMUR	217.645.000	2	Lembaga
73	BNN KOTA Jakarta Utara	217.645.000	2	Lembaga
74	BNNP BANTEN	239.002.000	2	Lembaga
75	BNN KOTA TANGERANG SELATAN	220.045.000	2	Lembaga
76	BNN KOTA Cilegon	220.045.000	2	Lembaga
77	BNN KOTA TANGERANG	220.045.000	2	Lembaga
78	BNNP JAWA BARAT	240.002.000	2	Lembaga
79	BNN KABUPATEN BOGOR	217.545.000	2	Lembaga
80	BNN KABUPATEN CIANJUR	217.545.000	2	Lembaga
81	BNN KOTA BANDUNG	217.545.000	2	Lembaga
82	BNN KOTA CIREBON	217.545.000	2	Lembaga
83	BNN KOTA CIMAHI	217.545.000	2	Lembaga
84	BNN KABUPATEN Sukabumi	217.545.000	2	Lembaga
85	BNN KABUPATEN GARUT	217.545.000	2	Lembaga
86	BNN KABUPATEN KUNINGAN	217.545.000	2	Lembaga
87	BNN KABUPATEN CIAMIS	217.545.000	2	Lembaga
88	BNN KOTA DEPOK	217.545.000	2	Lembaga
89	BNN KABUPATEN KARAWANG	217.545.000	2	Lembaga
90	BNN KABUPATEN BANDUNG BARAT	217.545.000	2	Lembaga
91	BNN KOTA TASIKMALAYA	217.545.000	2	Lembaga
92	BNN KABUPATEN SUMEDANG	217.545.000	2	Lembaga
93	BNNP JAWA TENGAH	246.002.000	2	Lembaga
94	BNN KABUPATEN TEMANGGUNG	188.555.000	2	Lembaga
95	BNN KOTA Tegal	188.555.000	2	Lembaga
96	BNN KABUPATEN Banyumas	188.555.000	2	Lembaga
97	BNN KABUPATEN CILACAP	188.555.000	2	Lembaga
98	BNN KABUPATEN KENDAL	188.555.000	2	Lembaga
99	BNN KABUPATEN BATANG	188.555.000	2	Lembaga
100	BNN KABUPATEN PURBALINGGA	188.555.000	2	Lembaga
101	BNN KABUPATEN MAGELANG	188.555.000	2	Lembaga
102	BNN KOTA SURAKARTA	188.555.000	2	Lembaga
103	BNNP DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	246.002.000	2	Lembaga
104	BNN KABUPATEN SLEMAN	187.320.000	2	Lembaga
105	BNN KOTA YOGYAKARTA	187.320.000	2	Lembaga
106	BNN KABUPATEN BANTUL	187.320.000	2	Lembaga
107	BNNP JAWA TIMUR	248.002.000	2	Lembaga
108	BNN KABUPATEN Sumenep	211.695.000	2	Lembaga
109	BNN KOTA Mojokerto	211.695.000	2	Lembaga
110	BNN KOTA MALANG	211.695.000	2	Lembaga
111	BNN KOTA BATU	211.695.000	2	Lembaga

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOL RO	SATUAN
112	BNN KABUPATEN TULUNGAGUNG	211.695.000	2	Lembaga
113	BNN KABUPATEN NGANJUK	211.695.000	2	Lembaga
114	BNN KABUPATEN SIDOARJO	211.695.000	2	Lembaga
115	BNN KOTA SURABAYA	211.695.000	2	Lembaga
116	BNN KOTA KEDIRI	211.695.000	2	Lembaga
117	BNN KABUPATEN MALANG	211.695.000	2	Lembaga
118	BNN KABUPATEN GRESIK	211.695.000	2	Lembaga
119	BNN KABUPATEN TRENGGALEK	211.695.000	2	Lembaga
120	BNN KABUPATEN LUMAJANG	211.695.000	2	Lembaga
121	BNN KABUPATEN BLITAR	211.695.000	2	Lembaga
122	BNN KABUPATEN KEDIRI	211.695.000	2	Lembaga
123	BNN KABUPATEN PASURUAN	211.695.000	2	Lembaga
124	BNN KABUPATEN TUBAN	211.695.000	2	Lembaga
125	BNNP KALIMANTAN BARAT	244.002.000	2	Lembaga
126	BNN KABUPATEN BENGKAYANG	209.415.000	2	Lembaga
127	BNN KABUPATEN SINTANG	209.415.000	2	Lembaga
128	BNN KOTA PONTIANAK	209.415.000	2	Lembaga
129	BNN KOTA SINGKAWANG	209.415.000	2	Lembaga
130	BNN KABUPATEN SANGGAU	209.415.000	2	Lembaga
131	BNN KABUPATEN MEMPAWAH	209.415.000	2	Lembaga
132	BNN KABUPATEN KUBU RAYA	209.415.000	2	Lembaga
133	BNNP KALIMANTAN TENGAH	245.002.000	2	Lembaga
134	BNN KOTA PALANGKARAYA	216.970.000	2	Lembaga
135	BNN KABUPATEN KOTA WARINGIN BARAT	216.970.000	2	Lembaga
136	BNNP KALIMANTAN SELATAN	246.002.000	2	Lembaga
137	BNN KABUPATEN Barito Kuala	191.195.000	2	Lembaga
138	BNN KOTA BANJARMASIN	191.195.000	2	Lembaga
139	BNN KOTA BANJARBARU	191.195.000	2	Lembaga
140	BNN KABUPATEN BALANGAN	191.195.000	2	Lembaga
141	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN	191.195.000	2	Lembaga
142	BNN KABUPATEN TANAH LAUT	191.195.000	2	Lembaga
143	BNN KABUPATEN TABALONG	191.195.000	2	Lembaga
144	BNN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	191.195.000	2	Lembaga
145	BNNP KALIMANTAN TIMUR	247.002.000	2	Lembaga
146	BNN KOTA BALIKPAPAN	192.460.000	2	Lembaga
147	BNN KOTA SAMARINDA	192.460.000	2	Lembaga
148	BNN KOTA BONTANG	192.460.000	2	Lembaga
149	BNNP KALIMANTAN UTARA	246.002.000	2	Lembaga
150	BNN KOTA TARAKAN	189.960.000	2	Lembaga
151	BNN KABUPATEN NUNUKAN	189.960.000	2	Lembaga

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOL RO	SATUAN
152	BNNP SULAWESI UTARA	201.002.000	2	Lembaga
153	BNN KABUPATEN Bolaang Mongondow	195.320.000	2	Lembaga
154	BNN KOTA BITUNG	195.320.000	2	Lembaga
155	BNN KOTA MANADO	195.320.000	2	Lembaga
156	BNN KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE	195.320.000	2	Lembaga
157	BNNP SULAWESI TENGAH	254.002.000	2	Lembaga
158	BNN KABUPATEN Banggai Kepulauan	219.745.000	2	Lembaga
159	BNN KABUPATEN MOROWALI	221.245.000	2	Lembaga
160	BNN KOTA PALU	219.745.000	2	Lembaga
161	BNN KABUPATEN DONGGALA	218.745.000	2	Lembaga
162	BNN KABUPATEN POSO	224.745.000	2	Lembaga
163	BNN KABUPATEN TOJO UNA-UNA	224.745.000	2	Lembaga
164	BNNP SULAWESI SELATAN	250.002.000	2	Lembaga
165	BNN KABUPATEN TANA TORAJA	204.070.000	2	Lembaga
166	BNN KABUPATEN Bone	204.070.000	2	Lembaga
167	BNN KOTA PALOPO	204.070.000	2	Lembaga
168	BNNP SULAWESI TENGGARA	251.002.000	2	Lembaga
169	BNN KABUPATEN Muna	187.195.000	2	Lembaga
170	BNN KABUPATEN KOLAKA	187.195.000	2	Lembaga
171	BNN KOTA KENDARI	187.195.000	2	Lembaga
172	BNN KOTA BAU-BAU	187.195.000	2	Lembaga
173	BNNP SULAWESI BARAT	256.002.000	2	Lembaga
174	BNN KABUPATEN POLEWALI MANDAR	198.255.000	2	Lembaga
175	BNNP MALUKU	255.002.000	2	Lembaga
176	BNN KABUPATEN Buru Selatan	199.340.000	2	Lembaga
177	BNN KOTA TUAL	199.340.000	2	Lembaga
178	BNNP MALUKU UTARA	251.002.000	2	Lembaga
179	BNN KABUPATEN Pulau Morotai	208.500.000	2	Lembaga
180	BNN KOTA TIDORE KEPULAUAN	208.500.000	2	Lembaga
181	BNN KABUPATEN HALMAHERA UTARA	208.500.000	2	Lembaga
182	BNNP BALI	249.002.000	2	Lembaga
183	BNN KOTA DENPASAR	217.365.000	2	Lembaga
184	BNN KABUPATEN BADUNG	217.365.000	2	Lembaga
185	BNN KABUPATEN GIANYAR	217.365.000	2	Lembaga
186	BNN KABUPATEN BULELENG	217.365.000	2	Lembaga
187	BNN KABUPATEN KLUNGKUNG	217.365.000	2	Lembaga
188	BNN KABUPATEN KARANGASEM	217.365.000	2	Lembaga
189	BNNP NUSA TENGGARA BARAT	248.002.000	2	Lembaga
190	BNN KABUPATEN Bima	216.570.000	2	Lembaga
191	BNN KOTA MATARAM	216.570.000	2	Lembaga
192	BNN KABUPATEN SUMBAWA BARAT	216.570.000	2	Lembaga

NO	UNIT KERJA	ANGGARAN	VOL RO	SATUAN
193	BNN KABUPATEN SUMBAWA	216.570.000	2	Lembaga
194	BNNP NUSA TENGGARA TIMUR	249.002.000	2	Lembaga
195	BNN KABUPATEN Belu	215.586.000	2	Lembaga
196	BNN KOTA KUPANG	215.586.000	2	Lembaga
197	BNN KABUPATEN ROTE NDAO	215.586.000	2	Lembaga
198	BNNP GORONTALO	248.002.000	2	Lembaga
199	BNN KABUPATEN BOALEMO	185.422.000	2	Lembaga
200	BNN KOTA GORONTALO	185.422.000	2	Lembaga
201	BNN KABUPATEN BONE BOLANGO	185.422.000	2	Lembaga
202	BNN KABUPATEN GORONTALO	185.422.000	2	Lembaga
203	BNN KABUPATEN GORONTALO UTARA	185.422.000	2	Lembaga
204	BNNP PAPUA	264.002.000	2	Lembaga
205	BNN KABUPATEN Mimika	205.151.000	2	Lembaga
206	BNN KABUPATEN JAYAPURA	205.151.000	2	Lembaga
207	BNNP PAPUA BARAT	264.024.000	2	Lembaga

Penanggung Jawab Kegiatan,

Nama : Drs. Yuki Ruchimat, M.Si
NIP : 196709021994031007

Lampiran

Matrik Rencana Volume Rincian Output Kegiatan
Direktorat Peran Serta Masyarakat
Tahun 2024

NO	KEGIATAN	RINCIAN OUTPUT (RO)	VOLUME RO
1.	Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat (3257)	Petunjuk Pelaksanaan KOTAN (3257.AFA.001)	1 NSPK
		Advokasi Kebijakan Kabupaten/Kota Tanggap Ancaman Narkoba (3257.QDB.001)	414 Lembaga

Penanggung Jawab Kegiatan,

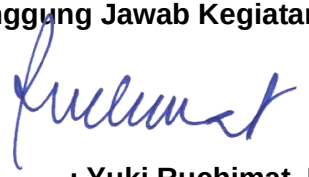

Nama : Yuki Ruchimat, M.Si
NIP : 196709021994031007